**Unit 1**

# HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**PENDAHULUAN**

B

 uku ini merupakan materi awal dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam unit satu ini akan dibahas konsep pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pengertian, visi, misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan serta sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan secara umum Indonesia. Pertama, di dalam pengertian pendidikan kewarganegaraan akan dibahas mengenai pengertian pendidikan kewaraganegaraan menurut para ahli dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, akan dibahas visi dan misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ketiga, akan membahas tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dan yang terakhir akan membahas sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan secara umum di Indonesia. Mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang.

Sejalan dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipergunakan untuk menanamkan pendidikan nilai, moral, dan norma secara terus menerus, sehingga warga negara tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang yang baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya konsep nilai, moral, dan norma menjadi karakteristik utama Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Terlebih jika mengingat kenyataan bahwa bangsa Indonesia sekarang sedang mengalami krisis jati diri, sehingga nilai moral dan norma menjadi hal yang penting untuk membentengi kekrisisan jati diri bangsa ini.

Setelah mempelajari Unit 1 ini, Anda diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian, visi, misi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan
2. Menganalisis urgensi dari pendidikan kewarganegaraan
3. Mengetahui sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaran

Sebelum Anda melangkah ke unit berikutnya, pahami betul isi Unit 1 ini, sehingga akan memudahkan Anda memahami unit yang lain tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan/tugas yang disertai dengan rambu-rambu jawaban, serta soal tes formatif dengan kunci jawabannya. Soal-soal ini sebaiknya Anda jawab secara mandiri, dan baru Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang tersedia. Jumlah jawaban mandiri Anda yang benar dihitung dengan rumus yang disediakan dalam buku ini, sehingga Anda secara jujur dapat mengetahui sejauh mana posisi Anda dalam memahami materi dari unit yang telah Anda pelajari ini. Mantapkan lagi pemahaman Anda melalui refleksi, dan saling berdiskusi dengan teman/mahasiswa lain atau orang yang Anda anggap ahli dalam hal materi ini. Selanjutnya, marilah kita mulai belajar dengan menelaah Subunit 1 di bawah ini.



# Subunit 1

## Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

### Pengantar

Menurut Nu’man Soemantri (2001) Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengajarkan akan pentingnya nilai-nilai dari hak dan kewajiban warga negara. Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau professional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

### Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada warga negara, hal ini dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan guna mendukung peran aktif mereka dalam masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warganegara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa negara.

Secara etimologis, Pendidikan Kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, ialah kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*. Kewarganegaraan merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara.

Menurut Zamroni dalam (Taniredja: 2013) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge*, *awareness*, *attitude*, *political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil kepurusan politik secara rasional dan menguntungkan bgi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Tidak berbeda jauh dengan pendapat di atas, Soemantri (2001: 299) juga mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan atau pembelajaran yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan dan memberdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, sikap yang demokratis serta memiliki karakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.



### Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warganegara. Dengan kemampuan dasar diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap, berfikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, bersikap demokratis dan berkeadaban. Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep./2006, **Visi Misi Pendidikan Kewarganegaraan** adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun **Misi Pendidikan Kewarganegaraan** di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta anah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab. Kompetensi yang diharapkan dari PKN adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban; dan menjadi warganegara yang memiliki daya saing; berdidiplin; berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

### Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun secara umum tujuan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*Civic* *Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Murron: 2013).

Sedangkan menurut Mulyasa (2007) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa:

* + 1. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.
		2. Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan, dan
		3. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika pendidikan nilai moral dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini, karena jika siswa sudah memiliki nilai moral yang baik, maka tujuan untuk membentuk warga negara yang baik akan mudah diwujudkan.

Berdasarkan Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI Pasal 3 No. 267/DIKTI/2000 Tentang Penyempurnaan Garis Besar Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) menyebutkan bahwa PKn di perguruan tinggi bertujuan untuk:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Mempupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan dan patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

**D. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia**

*Civics* pertama kali dikenalkan di USA pada tahun 1790 dalam rangka “meng-Amerika-kan bangsa Amerika” atau yang dikenal dengan nama “*theory of Americanization*”. Materi yang dibahas adalah masalah pemerintah, hak dan kewajiban warga negara. Konsep ini selanjutnya diikuti oleh negara lain termasuk negara jajahan yang isinya berbeda. Namun pada hakekatnya adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban, serta menjadi patriot bagi negaranya. Pendidikan Kewarganegaraan, seperti yang dilakukan hampir oleh seluruh bangsa di dunia, dengan berbagai nama seperti: *civic education, citizenship education*, dan *democracy education* Mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban.

Sementara itu untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan: 2016). Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) *Civics* (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam *Civics* (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "*nation and character building*” bangsa Indonesia.

Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/PKI yang kemudian diikuti oleh pembaharuan tatanan dalam pemerintahan. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dibatasi oleh tonggak yang resmi dengan diserahkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Tanggal itulah yang kemudian dijadikan tonggak pemerintahan Orde Baru, yang mengandung tekad untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen. Perubahan sistem ketatanegaraan/pemerintahan ini kemudian diikuti dengan kebijaksanaan dalam pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri P & K No. 31/1967 yang menetapkan bahwa pelajaran *Civics* isinya terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPRS dan Pengetahuan tentang PBB.

Pada tahun 1968, kebijaksanaan dalam bidang pendidikan ini disusul dengan keluarnya Kurikulum 1968. Dalam kurikulum ini istilah Civics, yang secara tidak resmi diganti dengan istilah Kewargaan Negara, diganti lagi dengan Pendidikan Kewargaan Negara, yang lebih dikenal dengan singkatan PKN. Pendidikan Kewargaan Negara pada masa ini sudah tidak lagi menggunakan metode indoktrinasi dalam pengajarannya. Bahan pokoknya pun telah ditetapkan dalam kurikulum tersebut yang meliputi:

1. Untuk tingkat Sekolah Dasar: Pengetahuan Kewargaan Negara, Sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi.
2. Untuk tingkat SMP: Sejarah Kebangsaan, Kejadian setelah kemedekaan, Pancasila, Ketetapan-ketetapan MPRS.
3. Untuk tingkat SMA: Uraian pasal-pasal dalam UUD 1945 dihubungkan dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi.

Pada 1975 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini memiliki dasar konstitusional, yaitu Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 (tentang GBHN) yang menyatakan “Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila. Dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda (Taniredja: 2013).

Pada tahun 1994, nama Pendidikan Moral Pancasila diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Bila dikaitkan dengan kurikulum sebelumnya, mata pelajaran tersebut memadukan konsep Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Istilah Pendidikan Moral Pancasila diperbaiki menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaran. Kemudian dipadukan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”. Pendidikan Pancasila memiliki konotasi lebih luas dan utuh daripada Pendidikan Moral Pancasila, karena Pancasila tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga mengandung konsep, nilai, moral, dan norma. Karena itu, perubahan ini sangat tepat. Materi yang terkandung dalam pelajaran PPKn tidak jauh berbeda dengan materi yang terkandung dalam pelajaran PMP.

Perkembangan berikutnya dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka PPKn diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kemudian pada tahun 2004 kurikulum PKn SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS, menjadi PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial), sementara di tingkat SMP dan SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kurikulum Berbasis Kompetensi kewarganegaraan tampak telah mengarah pada tiga komponen PKn yang bermutu seperti yang diajukan oleh *Centre for Civic Education* pada tahun 1999 dalam *National Standard for Civics and Government*. Ketiga komponen tersebut yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan).

Pada tahun 2006, Kurikulum Berbasis Kompetensi mengalami perubahan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam kurikulum ini Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Demikian pula pada tingkat SMP dan SMA Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selanjutnya pada Tahun 2013, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kembali mengalami perubahan menjadi Kurikulum 2013. Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

### Latihan

* + - * 1. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan?
				2. Jelaskan visi dan misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi!
				3. Jelaskan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi!
				4. Jelaskan sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan secara umum di Indonesia!
				5. Mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam setiap negara?

### Rambu-rambu jawaban soal latihan

1. Uraikan konsep tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan baik itu menurut para ahli ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kemudian simpulkan berdasarkan pendapat sendiri.
2. Uraikan visi dan misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berdasarkan materi yang telah dipelajari.
3. Uraikan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berdasarkan materi yang telah dipelajari.
4. Uraikan secara ringkas sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan secara umum di Indonesia berdasarkan informasi yang telah anda dapatkan.
5. Berikan pendapat Anda mengenai perlunya pendidikan kewarganegaraan disetiap negara berdasarkan konsep yang telah dipelajari.

**Rangkuman**

1. Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan atau pembelajaran yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan dan memberdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, sikap yang demokratis serta memiliki karakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
2. Visi Pendidikan Kewarganegaraanmerupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
3. Misi Pendidikan Kewarganegaraandi perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta anah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab.
4. Tujuan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*Civic* *Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
5. Civics pertama kali dikenalkan di USA pada tahun 1790 dalam rangka “meng-Amerika-kan bangsa Amerika” atau yang dikenal dengan nama “*theory of Americanization*”. Materi yang dibahas adalah masalah pemerintah, hak dan kewajiban warga negara.
6. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia seringkali mengalami perubahan nama dimulai dari Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1962), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Pendidikan Kewarganegaraan (2004), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2013).

## Tes Formatif

1. Seacara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata yaitu “pendidikan” dan “kewarganegaraan”. Kewarganegaraan merupakan….
2. suatu hal yang berhubungan dengan warga negara serta keanggotaan sebagai warga negara
3. proses dan berbagai cara dalam mendapatkan kewarganegaraan
4. salah satu unsur pokok sebuah negara dan masing-masing warga negara mempunyai hak serta kewajiban yang tentunya harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya
5. suatu hal yang berkaitan dengan negara
6. pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis
7. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warganegara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian pendidikan kewarganegaraan yang tertuang dalam….
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003
10. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
11. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012
12. Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI pasal 3 No. 267/DIKTI/2000
13. Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta anah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab. Pernyataan tersebut merupakan …. dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.
14. Visi
15. Misi
16. Tujuan
17. Fungsi
18. Kompetensi
19. *Civics* pertama kali dikenalkan di USA pada tahun 1790 dalam rangka “meng-Amerika-kan bangsa Amerika” atau yang dikenal dengan nama “*theory of Americanization*”. Materi yang dibahas adalah….
20. kebudayaan Amerika
21. masalah pemerintah, hak dan kewajiban warga negara
22. toeri kenegaraan
23. masalah politik kenegaraan, hukum dan ekonomi
24. masalah politik, sosial dan budaya
25. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia pertama kali dikenal dengan istilah….
26. Pendidikan Kewarganegaraan
27. Pendidikan Kewargaan Negaran
28. Civics
29. Kewarganegaraan
30. PMP
31. Pada tahun 1975 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini memiliki dasar konstitusional yaitu Ketetapan MPR Nomor….
32. Ketetapan MPR No IV/MPR/1973
33. Ketetapan MPR No V/MPR/1973
34. Ketetapan MPR No VI/MPR/1973
35. Ketetapan MPR No VII/MPR/1973
36. Ketetapan MPR No VIII/MPR/1973
37. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Hal ini merupakan lahirnya pendidikan kewarganegaraan ditinjau secara….
38. Teoritis
39. Terminologis
40. Historis
41. Yuridis
42. Sosiologis
43. Tiga komponen PKn yang bermutu yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) dikenal pada masa kurikulum….
44. Kurikulum 1975
45. Kurikulum 1994
46. Kurikulum Berbasis Kompetensi
47. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
48. Kurikulum 2013
49. Pendidikan Moral Pancasila diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada tahun….
50. 1990
51. 1991
52. 1992
53. 1993
54. 1994
55. Pada kurikulum 2013 PKn kembali berganti nama menjadi PPKn hal ini disebabkan karena …. *kecuali*
56. Mengembalikan hakikat Pancasila yang mulai hilang
57. PKn lebih terkesan dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional
58. Secara metodologis dalam PKn ada kecenderungan dominasi pembelajaran kognitif, sehingga dimensi afektif dan psikomotorik belum dikembangkan secara optimal
59. Kemauan menteri pendidikan dan pemerintah
60. Menyempurnakan muatan materi

#  Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 2000. Penyempurnaan (GBPP) (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Murron, Faisal Sadam. 2013. *Penerapan Metode Permainan Simulasi Dalam Pembelajaran Pkn Untuk Menumbuhkan Etika Warga Negara Pada Siswa*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Soemantri, Nu’man. 2001. *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.

Soemantri, Nu’man. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Taniredja, Tukiran dkk. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

# Glosarium

*Civics*: dirumuskan dengan ilmu kewargaan negara yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik) dan individu-individu dan dengan negara.

Misi: tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan : program pendidikan yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan guna mendukung peran aktif mereka dalam masyarakat dan negara di masa yang akan datang.

*Political Efficacy*: istilah yang mengacu kepada perasaan bahwa tindakan politik (partisipasi politik) seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses politik.

*Political knowledge* (Pengetahuan politik):  dapat diasumsikan sebagai pemahaman masyarakat terhadap berbagai lini terkait proses-proses politik.

*Political Participation* (partisipasi politik): kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Visi: serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai.